

POTRET PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF

**Nur Azizah¹, Asmahusnul Khatima², Nurhasana Auliyah³, Ahlun Ansar^{*4},
Arismunandar⁵**

Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri
Makassar^{1,2,3,4,5}

e-mail: nurazizahh2317@gmail.com, asmahusnulkhatima2320@gmail.com,
nurhasanaauliyah2303@gmail.com, ahlunansar@unm.ac.id, arismunandar@unm.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua siswa, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, di sekolah-sekolah umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program pendidikan inklusif di SD Impres Maccini Baru, Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui observasi dan wawancara mendalam dengan kepala sekolah. Fokus kajian ini adalah pada kebijakan sekolah, cara penerimaan siswa berkebutuhan khusus, penyesuaian kurikulum, fasilitas yang mendukung, peran Guru Pendamping Khusus, serta tantangan yang dihadapi sekolah dan strategi untuk mengatasinya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah telah melaksanakan pendidikan inklusif secara terencana dan kolaboratif, meskipun masih ada kekurangan dalam jumlah tenaga pendamping dan fasilitas. Kerja sama antara guru, orang tua, dan komunitas menjadi unsur penting dalam keberhasilan program inklusif di sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman untuk pengembangan pendidikan inklusif di sekolah dasar lainnya dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan yang memungkinkan semua peserta didik belajar tanpa diskriminasi.

Kata Kunci: *Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus, Sekolah Inklusif*

ABSTRACT

Inclusive education is an approach that provides equal learning opportunities for all students, including children with special needs, in mainstream schools. This study aims to analyze the implementation of the inclusive education program at SD Impres Maccini Baru, Makassar. The method used in this study was qualitative through observation and in-depth interviews with the principal. This study focused on school policies, the admission process for students with special needs, curriculum adjustments, supporting facilities, the role of Special Assistant Teachers, as well as challenges faced by the school and strategies to overcome them. The findings of this study indicate that the school has implemented planned and collaborative inclusive education, although there are still shortcomings in the number of assistants and facilities. Collaboration between teachers, parents, and the community is a crucial element in the success of the inclusive program at the school. The results of this study are expected to serve as guidelines for the development of inclusive education in other elementary schools and contribute to improving the quality of educational services that enable all students to learn without discrimination.

Keywords: *Inclusive Education, Children with Special Needs, Inclusive Schools*

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensi yang memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak. Permasalahan klasik seperti tingginya angka buta huruf, tingkat putus sekolah yang masih mengkhawatirkan, serta fenomena perilaku nakal remaja menjadi hambatan utama dalam

pembangunan sumber daya manusia. Di samping masalah sosial tersebut, isu mengenai kesetaraan dan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat juga menjadi sorotan utama. Padahal, pendidikan merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan fundamental bagi kehidupan berbangsa. Hal ini telah dijamin secara konstitusional sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang mengamanatkan hak pendidikan bagi setiap warga negara. Selain itu, regulasi turunannya, yakni Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, secara eksplisit menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan jaminan penuh kepada setiap anak bangsa. Jaminan ini mencakup anak-anak dengan kondisi khusus atau anak berkebutuhan khusus, agar mereka mendapatkan akses dan layanan pendidikan yang berkualitas setara dengan siswa lainnya tanpa diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, bab IV pasal 5 ayat 1, kembali ditegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, berhak atas pendidikan yang berkualitas demi menjamin keberlangsungan hidup dan masa depan mereka (Sahrudin et al., 2023).

Sebagai respons terhadap amanat undang-undang dan kebutuhan akan pemerataan pendidikan tersebut, konsep sekolah inklusif muncul sebagai sebuah solusi strategis dan langkah progresif. Sekolah inklusif hadir untuk memastikan terciptanya akses pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, dengan memberikan hak dan kewajiban yang serupa kepada semua peserta didik, baik yang reguler maupun yang berkebutuhan khusus. Keberhasilan dalam implementasi pendidikan inklusif ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sangat bergantung pada sinergi dan kerja sama yang erat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sekolah sebagai pelaksana, dan komunitas masyarakat sebagai pendukung. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, ramah, dan menghormati keragaman yang ada di dalam kelas. Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dalam *setting* inklusif mencakup penyediaan layanan spesifik yang diadaptasi secara cermat sesuai dengan kebutuhan unik masing-masing individu. Layanan ini sangat krusial, seperti bagi siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam penglihatan, pendengaran, fisik, ataupun intelektual. Adaptasi ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan mereka secara holistik, meliputi aspek akademis, kematangan emosional, dan kemampuan sosial mereka agar dapat berbaur dengan masyarakat luas (Wijaya et al., 2023).

Meskipun konsep ideal pendidikan inklusif telah dirumuskan, seiring dengan pelaksanaan pendidikan inklusif di lapangan, khususnya pada studi kasus di SD Inpres Maccini Baru Makassar, fakta menunjukkan bahwa implementasinya masih menemui berbagai tantangan yang cukup berat. Kesenjangan antara harapan kebijakan dan realitas di lapangan terlihat jelas, khususnya terkait dengan kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan minimnya fasilitas fisik yang mendukung aksesibilitas. Para guru di sekolah tersebut dituntut untuk terus meningkatkan keterampilan pedagogis mereka, terutama dalam hal menyesuaikan metode pengajaran agar relevan dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan spesifik masing-masing Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Meskipun guru kelas reguler dan Guru Pendamping Khusus (GPK) telah berusaha keras memberikan bantuan maksimal, metode pengajaran yang digunakan sering kali masih terlalu mirip dengan pendekatan klasikal untuk siswa reguler, sehingga intervensi tersebut belum sepenuhnya efektif bagi ABK. Selain itu, sekolah juga menghadapi kendala karena belum memiliki kurikulum khusus yang adaptif dan masih cenderung mengikuti kurikulum nasional yang hanya disesuaikan seadanya. Kondisi ini sering kali menyulitkan ABK untuk terlibat aktif dan bermakna dalam proses belajar mengajar di kelas (Sahrudin et al., 2023).

Di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan struktural tersebut, SD Inpres Maccini Baru tetap menunjukkan dedikasi yang besar dan komitmen kuat terhadap penerapan

pendidikan inklusif di lingkungan mereka. Sekolah ini secara proaktif melakukan serangkaian proses identifikasi dan penilaian awal (*assessment*) yang komprehensif untuk setiap siswa yang terindikasi membutuhkan dukungan khusus. Langkah ini diambil untuk memetakan kebutuhan belajar siswa sejak dini. Selain itu, pihak sekolah juga berupaya menyediakan ruang bimbingan khusus, media pembelajaran yang bersifat adaptif, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya agar ABK dapat belajar berdampingan secara harmonis bersama siswa reguler dalam satu atap. Upaya keras ini tidak hanya berhenti pada penyediaan fasilitas fisik semata, tetapi juga merambah pada aspek kolaboratif. Kerjasama yang terjalin antara guru kelas, GPK, dan orang tua siswa juga menjadi elemen vital yang sangat membantu keberhasilan penerapan pendidikan inklusif di sekolah ini. Sinergi tripartit ini menjadi kunci dalam memantau perkembangan siswa dan memastikan bahwa setiap hambatan belajar dapat dicarikan solusinya secara bersama-sama, sehingga hak pendidikan anak tetap terpenuhi meskipun dengan sumber daya yang terbatas.

Untuk memahami posisi penelitian ini dalam khazanah akademik, perlu melihat berbagai studi terdahulu yang telah memberikan wawasan mengenai dinamika penerapan pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar. Misalnya, penelitian yang dilakukan di SDN 4 Palangka dan SDN 3 Langkai menyoroti aspek-aspek fundamental dalam penyelenggaraan inklusi. Studi tersebut menekankan pentingnya landasan hukum yang kuat sebagai payung kebijakan, penerimaan warga sekolah terhadap siswa dengan kebutuhan khusus, upaya penyesuaian dalam proses belajar mengajar, serta dukungan teknis dari Guru Pendamping Khusus (GPK). Temuan dari studi ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program inklusi sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, yakni dedikasi kepala sekolah, serta kolaborasi harmonis antara guru kelas dan GPK. Selain itu, strategi pengajaran yang efektif dan keterlibatan aktif orang tua juga menjadi penentu, meskipun sekolah-sekolah tersebut kerap dihadapkan pada kendala klasik terkait keterbatasan dana operasional, infrastruktur yang belum ramah disabilitas, dan kurangnya kualifikasi sumber daya manusia yang tersedia (Tamela et al., 2020).

Melengkapi perspektif sebelumnya, penelitian lain yang dilakukan di lokasi yang berbeda, yakni di SDN Unggulan Mongisidi I Makassar, memberikan penekanan pada aspek manajerial. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya aspek pengelolaan kesiswaan yang rapi, perlunya perubahan atau modifikasi kurikulum yang fleksibel, dan kerja sama yang solid antara guru, GPK, serta orang tua siswa. Studi ini juga menyoroti dukungan masyarakat luas sebagai faktor penguat eksternal yang dapat menciptakan ekosistem inklusif yang berkelanjutan. Temuan ini memperkaya pemahaman bahwa inklusi bukan hanya soal aktivitas di dalam kelas, melainkan manajemen sekolah secara keseluruhan. Akan tetapi, meskipun memberikan gambaran manajerial yang baik, penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum membahas secara rinci dan mendalam mengenai teknis strategi penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran spesifik yang tepat bagi setiap jenis anak berkebutuhan khusus. Ketiadaan detail pedagogis ini meninggalkan celah pengetahuan mengenai bagaimana sebenarnya interaksi instruksional yang efektif terjadi antara guru dan siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas sehari-hari (Putri & Mus, 2021).

Sementara itu, perspektif yang lebih luas diperlihatkan oleh penelitian di Kabupaten Bandung Barat yang menunjukkan bahwa penerapan pendidikan inklusif di wilayah tersebut masih belum merata. Ketimpangan ini disebabkan oleh terbatasnya aksesibilitas fisik, kurangnya jumlah guru yang terampil dalam pendidikan khusus, serta ketersediaan fasilitas penunjang yang sangat tidak memadai. Selain faktor teknis, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai disabilitas juga berkontribusi signifikan terhadap kurangnya dukungan sosial untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah umum (Susanti & Herawati, 2024). Dengan mengacu

pada paparan penelitian-penelitian sebelumnya, terlihat bahwa mayoritas studi lebih banyak memfokuskan perhatian pada aspek kebijakan makro, ketersediaan prasarana, serta faktor pendukung dan penghambat secara umum, tanpa mendalami praktik pembelajaran inklusif secara mikro dan komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan nilai kebaruan yang bertujuan untuk menganalisis penerapan pendidikan inklusif di SD Inpres Maccini Baru secara menyeluruh dan mendalam. Fokus utamanya adalah pada detail penyesuaian kurikulum, variasi metode pembelajaran, dan kolaborasi instruksional antara guru kelas, GPK, dan orang tua. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi kajian mengenai manajemen dan praktik pendidikan inklusif di sekolah dasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menguraikan secara komprehensif mengenai potret pelaksanaan program pendidikan inklusif di lingkungan sekolah dasar. Lokasi penelitian dipusatkan secara spesifik di SD Inpres Maccini Baru, Kota Makassar, yang dipilih secara *purposive* karena statusnya sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang telah menerima keberagaman siswa. Fokus utama kajian diarahkan pada analisis mendalam terkait kebijakan sekolah, manajemen penerimaan siswa, strategi kurikulum, serta ketersediaan fasilitas bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Sumber data utama dalam studi ini adalah kepala sekolah yang bertindak sebagai informan kunci, yang memberikan wawasan strategis mengenai tata kelola inklusi. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yang dijalankan secara simultan di lapangan. Pertama, observasi partisipasi pasif dilaksanakan untuk mengamati langsung dinamika interaksi sosial, aksesibilitas fisik, dan proses pembelajaran di kelas tanpa mengintervensi kegiatan natural warga sekolah. Kedua, wawancara terstruktur dilakukan menggunakan pedoman pertanyaan sistematis guna menggali perspektif informan tentang tantangan dan strategi sekolah. Ketiga, studi dokumentasi diterapkan untuk menelaah arsip resmi seperti dokumen kurikulum adaptif dan profil perkembangan siswa sebagai bukti fisik pelaksanaan program.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan aktif dalam merencanakan, mengumpulkan, menafsirkan, dan memverifikasi data temuan di lapangan. Peneliti dibantu oleh instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, catatan lapangan (*field notes*), dan alat perekam untuk memastikan akurasi dan keutuhan informasi yang dihimpun. Guna menjamin keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dan teknik untuk mengonfirmasi konsistensi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bukti observasi dan dokumen tertulis. Tahap analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang berlangsung secara siklikal dan berkelanjutan hingga data mencapai titik jenuh. Proses ini diawali dengan reduksi data, yaitu menyeleksi, memusatkan perhatian pada hal-hal pokok, dan menyederhanakan data mentah dari lapangan menjadi informasi yang bermakna. Langkah selanjutnya adalah penyajian data (*data display*) yang disusun dalam bentuk teks naratif yang logis untuk menggambarkan realitas implementasi inklusi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti merumuskan intisari temuan yang didukung bukti valid untuk menjawab rumusan masalah, sehingga menghasilkan deskripsi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Kebijakan Sekolah

Berdasarkan hasil studi, penerapan pendidikan inklusif di SD Inpres Maccini Baru berjalan dengan kebijakan yang tegas, rapi, dan berkesinambungan. Kebijakan ini tercatat tidak hanya dalam dokumen resmi, tetapi juga terealisasi melalui tindakan yang nyata di lingkungan sekolah. Proses pendidikan inklusif dimulai dengan identifikasi dan penilaian mendalam terhadap siswa dengan kebutuhan khusus untuk mengenali potensi serta kebutuhan mereka. Hasil dari penilaian tersebut digunakan untuk merancang Program Pembelajaran Individual (PPI) yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing anak dan dievaluasi secara berkala melalui profil perkembangan siswa.

Seluruh tahapan dilakukan secara kerjasama antara guru, kepala sekolah, staf pendidikan, dan orang tua, dengan dukungan dari guru Sekolah Luar Biasa serta konsultan dalam bidang pendidikan inklusif. Ini menunjukkan dedikasi sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang adil dan sesuai bagi seluruh siswa. Prinsip inklusif juga terlihat dalam visi dan misi sekolah yang menekankan kesetaraan, penghargaan terhadap keragaman, dan semangat kebersamaan sebagai bagian dari budaya sekolah sejak ditunjuk sebagai pelaksana pendidikan inklusif pada tahun 2003.

Untuk memperkuat pelaksanaan, sekolah secara reguler menginformasikan kebijakan inklusif melalui pertemuan tahunan yang melibatkan guru dan orang tua, dengan tujuan membangun sikap saling menghargai dan memperlihatkan penerimaan terhadap keberagaman di dalam kelas. Di samping itu, pelaksanaan program ini didukung oleh payung hukum nasional dan surat edaran dari Dinas Pendidikan yang mewajibkan setiap sekolah menerima sedikitnya 5% siswa dengan kebutuhan khusus. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Inpres Maccini Baru berlangsung secara terarah, terencana, dan mengikuti regulasi yang ada.

2. Penerimaan Peserta Didik Baru

Berdasarkan temuan penelitian, penerimaan siswa yang memiliki kebutuhan khusus di SD Inpres Maccini Baru telah dilakukan dengan cara yang terencana sesuai dengan kebijakan pendidikan yang inklusif. Pendaftaran dilakukan melalui jalur afirmasi dengan batas maksimum 5% dari jumlah siswa baru, yaitu sekitar 2 sampai 3 siswa berkebutuhan khusus setiap tahunnya. Mengingat adanya keterbatasan dalam sumber daya, terutama jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK) serta fasilitas yang belum sepenuhnya memadai, sekolah hanya menerima siswa dengan kebutuhan sedang hingga ringan yang masih mampu mengikuti pembelajaran dengan beberapa penyesuaian.

Selama proses penerimaan, dibentuk tim khusus yang melibatkan GPK untuk melakukan identifikasi dan observasi awal terhadap calon siswa agar dapat memahami kondisi mereka sejak awal. Sekolah tidak melakukan seleksi yang ketat, melainkan berupaya menciptakan lingkungan belajar yang bersahabat dan inklusif. Beberapa fasilitas seperti akses yang ramah terhadap disabilitas dan kursi roda untuk siswa tunadaksa telah disediakan demi mendukung kenyamanan belajar. Proses identifikasi dan penilaian dilakukan secara sistematis melalui observasi guru, pengisian formulir identifikasi awal, serta penilaian mendalam untuk menentukan kebutuhan dan layanan pendidikan yang sesuai. Aktivitas ini dilakukan secara kolaboratif antara guru kelas, GPK, orang tua, dan ahli pendidikan inklusif agar hasilnya objektif dan komprehensif. Dalam penempatan kelas, sekolah membatasi jumlah siswa berkebutuhan khusus hingga maksimal tiga orang per kelas sehingga pendampingan dari GPK dan guru kelas dapat berlangsung dengan efektif. Strategi ini memastikan setiap siswa memperoleh perhatian yang sesuai tanpa mengganggu proses belajar di kelas reguler.

3. Kurikulum

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi kurikulum untuk siswa dengan kebutuhan khusus di SD Inpres Maccini Baru menunjukkan adanya pendekatan yang adaptif dan fleksibel

sambil tetap mengikuti kerangka kurikulum nasional. Sekolah tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku, tetapi melakukan penyesuaian terhadap tujuan, konten, metode, dan indikator pembelajaran agar sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Sebagai contoh, ketika siswa reguler belajar menghitung sampai 100, siswa berkebutuhan khusus dapat menetapkan target sampai angka 10 sesuai dengan kemampuan mereka. Penyesuaian ini dilakukan melalui kerja sama antara guru kelas dan Guru Pendamping Khusus (GPK). Dalam proses penyusunan RPP, guru kelas bertindak sebagai penyusun utama sedangkan GPK memberikan masukan berdasarkan hasil pengamatan terhadap kebutuhan siswa. RPP yang disusun bersifat inklusif, tidak dibuat secara terpisah, namun diberi tanda khusus untuk menyesuaikan tujuan atau indikator bagi siswa yang memerlukan bantuan khusus.

Para guru juga mengubah strategi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan visual, konkret, dan kontekstual, seperti pemanfaatan gambar, alat peraga, warna, serta kegiatan praktik, agar siswa dapat lebih memahami materi yang diajarkan. Tugas dan evaluasi diberikan dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan, misalnya dengan meminta siswa untuk menggambar atau menghubungkan gambar, bukan membuat peta konsep. Dalam proses penilaian, fokus utama tidak terletak pada perbandingan antar siswa, tetapi pada perkembangan masing-masing individu. Ada empat aspek utama yang disesuaikan, yaitu tujuan pembelajaran, materi, proses, dan evaluasi. Bentuk penilaian bervariasi dan dilakukan secara berkelanjutan, termasuk tugas sederhana, hasil karya, observasi, serta praktik langsung, yang mencerminkan kemajuan nyata setiap siswa sesuai dengan potensi mereka.

4. Mobilisasi Dan Fasilitas ABK

Berdasarkan analisis yang dilakukan, implementasi pendidikan inklusif di SD Inpres Maccini Baru menunjukkan keseriusan dalam menyediakan sarana untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), meskipun ketersediaan tersebut masih terbatas. Sekolah memiliki ruang khusus untuk terapi, bimbingan, atau aktivitas pendukung, tetapi ruang tersebut bukanlah ruang belajar utama karena prinsip pembelajaran tetap bersifat inklusif di kelas biasa. Dalam hal fasilitas fisik, sekolah telah menyediakan jalur landai dan ruang khusus, tetapi penyebarannya belum merata. Toilet dan jalan akses belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas, sehingga masih ada siswa yang memerlukan bantuan. Situasi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam anggaran dan infrastruktur untuk mendukung akses yang ramah bagi semua siswa. Dalam proses belajar mengajar, Guru Pendamping Khusus (GPK) memanfaatkan berbagai media seperti gambar, video, audio, dan alat bantu digital, termasuk tablet untuk komunikasi bagi siswa yang mengalami gangguan pendengaran atau bicara. Pemanfaatan media ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa ABK. Namun, sekolah belum menyediakan layanan transportasi khusus untuk siswa ABK, sehingga pergerakan mereka masih tergantung pada orang tua. Ini menjadi salah satu tantangan utama dalam menciptakan pendidikan inklusif yang sepenuhnya dapat diakses.

5. Sumber Daya Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dalam implementasi pendidikan inklusif di SD Inpres Maccini Baru masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi struktur maupun teknis. Dalam tahap perekrutan, sekolah menetapkan bahwa Guru Pendamping Khusus (GPK) harus memiliki latar belakang pendidikan khusus dan paling tidak berijazah S1. Namun, penerapan kebijakan ini menemui kesulitan karena belum adanya formasi spesifik untuk GPK dalam sistem perekrutan yang berlaku di pemerintah (seperti P3K). Akibatnya, sejumlah lulusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) ditempatkan sebagai guru biasa, bukan sebagai pendamping bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Saat ini, hanya ada dua GPK aktif di sekolah yang masih dalam proses menyelesaikan pendidikan sarjana, sehingga dukungan bagi ABK belum berjalan maksimal.

Tugas GPK terfokus pada pendampingan dalam belajar dan penyesuaian sosial, bukan pada pengajaran langsung. Mereka mendukung ABK untuk mengikuti aktivitas dalam kelas reguler serta memberikan terapi ringan bagi siswa yang membutuhkannya. Walaupun telah dilaksanakan pelatihan pendidikan inklusif, pelaksanaannya masih terhambat oleh jumlah peserta yang terbatas. Kendati demikian, pelatihan itu berhasil meningkatkan pemahaman guru mengenai strategi pembelajaran bagi ABK, sehingga sekolah berharap kegiatan ini bisa diperluas hingga mencakup semua guru. Sekolah juga memiliki seorang konselor untuk mengenali dan mengevaluasi siswa, tetapi belum mendapatkan dukungan dari tenaga profesional seperti psikolog atau terapis, sehingga siswa yang membutuhkan layanan tambahan diarahkan ke lembaga luar. Usaha peningkatan kemampuan dilakukan melalui pertemuan diskusi rutin antara guru dan manajemen sebagai media untuk berbagi pengalaman serta memperkuat pelaksanaan pendidikan yang inklusif.

6. Tantangan

Pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Impres Maccini Baru masih berhadapan dengan berbagai masalah yang memengaruhi kualitas layanan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Salah satu masalah utama adalah sedikitnya jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK), sehingga dukungan yang diberikan belum maksimal. Dalam sejumlah kasus, orang tua diharuskan untuk membantu anak mereka, khususnya bagi siswa yang memiliki perilaku hiperaktif, yang menambah tekanan pada guru kelas dalam mengatur proses pembelajaran. Di samping itu, beberapa GPK masih berstatus mahasiswa sehingga sering kali tidak hadir karena keperluan kuliah, yang mengakibatkan dukungan yang diberikan menjadi tidak teratur. Keterbatasan fasilitas dan prasarana, seperti ruang kelas dan alat bantu belajar, juga menghambat efektivitas pembelajaran untuk ABK. Sebagai solusi, pihak sekolah memanfaatkan guru yang tidak memiliki jam mengajar untuk membantu GPK dalam mendampingi siswa ABK. Pendekatan ini tidak hanya meredakan beban kerja GPK, tetapi juga memperkuat pemahaman dan rasa empati guru terhadap kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, serta memperkuat suasana belajar yang inklusif dan kolaboratif.

Pembahasan

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Impres Maccini Baru menunjukkan adanya komitmen institusional yang kuat melalui perencanaan yang terstruktur dan konsisten. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa kebijakan sekolah tidak sekadar dokumen administratif, melainkan termanifestasi dalam praktik nyata seperti identifikasi dini kebutuhan siswa dan penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI). Langkah strategis ini sangat krusial karena memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan relevan dengan kondisi unik setiap peserta didik. Temuan ini sejalan dengan pandangan Wijaya et al. (2023) yang menekankan bahwa keberhasilan inklusi di tingkat dasar sangat bergantung pada pedoman operasional yang jelas, mulai dari penilaian awal hingga adaptasi kurikulum. Sinergi antara kepala sekolah, guru, dan orang tua, serta dukungan eksternal dari tenaga ahli, menjadi fondasi kokoh yang memungkinkan kebijakan inklusif berjalan efektif. Tanpa kolaborasi lintas sektoral ini, kebijakan inklusi berisiko gagal mencapai tujuannya, sebagaimana diperingatkan dalam teori kebijakan publik yang menyoroti pentingnya konsistensi implementasi dan evaluasi berkelanjutan.

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah ini menerapkan jalur afirmasi yang membatasi kuota siswa berkebutuhan khusus sebesar 5%, sebuah langkah yang realistik untuk menjaga keseimbangan rasio guru dan siswa. Kebijakan kuota ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan strategi untuk menjamin kualitas pendampingan yang optimal di tengah keterbatasan sumber daya yang ada. Proses identifikasi awal yang dilakukan saat penerimaan memungkinkan sekolah memetakan kebutuhan siswa sejak dulu, sehingga

intervensi pendidikan dapat dirancang dengan tepat. Hal ini selaras dengan temuan Ranakusuma et al. (2021) yang menyatakan bahwa pembatasan kuota dalam sistem afirmasi diperlukan untuk menjaga keadilan layanan, mengingat minimnya jumlah guru pendamping khusus dan psikolog di sekolah reguler. Dengan pendekatan ini, sekolah tidak hanya membuka akses, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur dan tenaga pendidik dalam menyambut keragaman siswa, menghindari penerimaan yang sekadar formalitas tanpa dukungan substansial.

Dalam aspek kurikulum, sekolah menunjukkan fleksibilitas dengan mengadaptasi Kurikulum Nasional agar relevan bagi siswa berkebutuhan khusus. Modifikasi tujuan, materi, dan metode pembelajaran dilakukan tanpa menurunkan standar kualitas, melainkan menyesuaikan tingkat kesulitan dengan kemampuan individual siswa. Guru kelas bekerja sama erat dengan Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk merancang skenario pembelajaran yang diferensiasi, memastikan bahwa siswa dengan berbagai latar belakang kemampuan dapat belajar bersama dalam satu lingkungan. Praktik ini mendukung temuan di SDN 23 Mataram, di mana keberhasilan inklusi sangat ditentukan oleh kemampuan guru memodifikasi indikator pembelajaran. Secara teoritis, fleksibilitas kurikulum, sebagaimana difasilitasi dalam Kurikulum Merdeka, memberikan otonomi kepada guru untuk berinovasi (Suryani & Bagdawansyah, 2024). Dengan demikian, kurikulum adaptif menjadi instrumen vital untuk mewujudkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan inklusif.

Terkait fasilitas dan aksesibilitas, SD Inpres Maccini Baru telah berupaya menyediakan ruang pendampingan dan alat bantu belajar, meskipun infrastruktur fisik seperti *ramp* dan toilet khusus masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan fasilitas fisik ini menjadi tantangan umum dalam pendidikan inklusif di Indonesia, sebagaimana dicatat oleh Maimunah et al. (2024) yang menyoroti kurangnya kenyamanan dan keamanan bagi siswa disabilitas akibat minimnya aksesibilitas. Meskipun demikian, sekolah menyiasati keterbatasan ini dengan memaksimalkan penggunaan media pembelajaran visual dan teknologi digital yang adaptif. Pemanfaatan teknologi bantu (*assistive technology*) terbukti efektif dalam menjembatani hambatan belajar siswa (Nur & Wiwin, 2024). Upaya sekolah untuk tetap memberikan layanan terbaik di tengah keterbatasan sarana mencerminkan dedikasi yang tinggi, namun juga menjadi pengingat bagi pemangku kebijakan untuk meningkatkan dukungan anggaran demi penyediaan infrastruktur yang lebih inklusif dan ramah disabilitas.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pilar utama sekaligus tantangan dalam implementasi inklusi di sekolah ini. Keterbatasan jumlah GPK yang berlatar belakang pendidikan luar biasa memaksa sekolah memberdayakan guru reguler untuk mengambil peran lebih dalam pendampingan. Meskipun demikian, semangat kolaboratif yang terbangun melalui pelatihan internal dan forum diskusi guru menjadi kekuatan tersendiri. Guru reguler didorong untuk meningkatkan kompetensi pedagogik mereka agar lebih responsif terhadap kebutuhan siswa yang beragam. Temuan ini sejalan dengan studi Syarif dan Jannah (2024) yang menekankan pentingnya pengembangan profesionalisme guru melalui pelatihan berkelanjutan. Keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada spesialisasi GPK, tetapi juga pada kesiapan mental dan keterampilan seluruh staf pengajar untuk menciptakan lingkungan belajar yang suportif. Pemberdayaan SDM internal ini merupakan strategi adaptif yang efektif dalam mengatasi kesenjangan antara kebutuhan ideal dan realitas ketersediaan tenaga ahli (Hernawati et al., 2025; Nurhasanah et al., 2024; Sholeh, 2023).

Tantangan operasional yang dihadapi sekolah, seperti ketidakstabilan kehadiran GPK yang berstatus mahasiswa dan minimnya dukungan orang tua dalam beberapa kasus, memerlukan solusi kreatif dan sistematis. Strategi sekolah untuk melibatkan guru piket atau guru yang sedang tidak mengajar dalam proses pendampingan merupakan langkah inovatif

untuk mengisi kekosongan peran GPK. Pendekatan berbasis komunitas sekolah ini memperkuat empati dan tanggung jawab kolektif terhadap keberhasilan siswa berkebutuhan khusus. Hal ini mendukung pandangan Kriswanto et al. (2023) dan Putri et al., (2025) mengenai pentingnya *community of practice* di sekolah untuk mengatasi kekurangan sumber daya. Namun, tantangan eksternal seperti dukungan pemerintah yang belum optimal dan stigma budaya masih perlu diatasi melalui advokasi yang berkelanjutan. Sekolah harus terus membangun komunikasi dengan orang tua dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif secara holistik, tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di lingkungan sosial siswa.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa SD Inpres Maccini Baru telah berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan inklusif yang kuat meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumber daya. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan di tingkat daerah untuk mendukung pengadaan GPK profesional dan perbaikan fasilitas fisik sekolah inklusif. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang hanya pada satu sekolah, sehingga generalisasi temuan mungkin terbatas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi model kemitraan antara sekolah reguler dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) atau perguruan tinggi sebagai solusi alternatif mengatasi kekurangan tenaga ahli. Ke depan, keberhasilan pendidikan inklusif akan sangat bergantung pada seberapa mampu sistem pendidikan kita bertransformasi dari sekadar menerima perbedaan menjadi merayakan keberagaman sebagai aset pembelajaran yang berharga bagi seluruh siswa.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Inpres Maccini Baru mencerminkan komitmen institusional yang kokoh, di mana perencanaan terstruktur bermanifestasi nyata melalui identifikasi dini dan penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI). Strategi pembatasan kuota jalur afirmasi sebesar lima persen dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru terbukti bukan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan langkah rasional untuk menjaga kualitas pendampingan di tengah keterbatasan rasio guru dan siswa. Fleksibilitas kurikulum melalui modifikasi materi dan metode tanpa menurunkan standar kualitas menjadi kunci keberhasilan sekolah dalam mengakomodasi keberagaman kemampuan kognitif siswa. Meskipun infrastruktur fisik seperti aksesibilitas bangunan masih memerlukan pembenahan signifikan, sekolah berhasil melakukan mitigasi melalui optimalisasi media pembelajaran visual dan *assistive technology* yang adaptif. Sinergi kolaboratif antara kepala sekolah, guru reguler, dan orang tua menjadi fondasi vital yang memastikan layanan pendidikan tetap berjalan efektif. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan inklusi tidak semata bergantung pada kemewahan fasilitas fisik, melainkan pada ketepatan strategi manajerial dan inovasi pedagogik yang mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan ideal siswa dengan realitas ketersediaan sumber daya terbatas di lapangan.

Tantangan krusial terkait kelangkaan sumber daya manusia, khususnya kualifikasi Guru Pendamping Khusus, diatasi sekolah melalui pemberdayaan *community of practice* dan pelibatan guru piket, sebuah strategi adaptif yang memperkuat rasa tanggung jawab kolektif seluruh warga sekolah. Meskipun semangat kolaborasi internal sangat tinggi, stabilitas proses pendampingan masih sering terganggu oleh fluktuasi kehadiran tenaga bantu berstatus mahasiswa dan dukungan eksternal pemerintah daerah yang belum optimal. Oleh karena itu, keberlanjutan program inklusi sangat bergantung pada peningkatan kompetensi pedagogik guru reguler melalui pelatihan berkelanjutan guna menciptakan lingkungan belajar yang suportif secara holistik. Terkait saran untuk penelitian kedepannya, para akademisi disarankan untuk memperluas cakupan studi dengan pendekatan *multi-site* guna membandingkan efektivitas strategi manajerial antar sekolah inklusif yang memiliki karakteristik demografis berbeda untuk

mendapatkan generalisasi yang lebih luas. Selain itu, penelitian lanjutan sangat perlu mengeksplorasi secara mendalam mengenai konstruksi model kemitraan strategis antara sekolah reguler dengan perguruan tinggi atau Sekolah Luar Biasa sebagai solusi alternatif pengadaan tenaga ahli, serta melakukan studi longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang pendidikan inklusif terhadap perkembangan sosial-emosional siswa dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nur, W. R. (2023). Strategi penerimaan siswa baru pada sekolah inklusi di School of Human Jatisampurna Bekasi. *Idarah (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)*, 9(1), 29–43. <https://doi.org/10.47766/idarah.v9i1.1578>
- Alimuddin, N., & Wahyuningsih, B. Y. (2024). Implementasi pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri 23 Mataram. *Jurnal Teknologi dan Pendidikan Dasar*, 1(2), 45–49. <https://jurnal.unram.ac.id/index.php/tekdas/article/view/5283>
- Azizah, N., & Hendriyani, W. (2024). Analisis implementasi Kurikulum Merdeka dalam mengakomodasi keberagaman gaya belajar siswa. *Jurnal Educatio*, 10(2), 644–651. <https://doi.org/10.31949/educatio.v10i2.8586>
- Chamdani, M., et al. (2025). Pengaruh guru pendamping khusus terhadap implementasi pendidikan inklusif. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 8(3), 1236–1243. <https://jurnal.uns.ac.id/shes/article/view/92667>
- Helmawati, H., et al. (2025). Manajemen pendidikan inklusif untuk meningkatkan layanan anak berkebutuhan khusus. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(6), 6756–6764. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i6.8334>
- Hernawati, H., et al. (2025). Strategi pengembangan kompetensi ASN (studi kualitatif kompetensi teknis di BPSDM Provinsi Jawa Timur). *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 896. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6171>
- Kriswanto, D., et al. (2023). Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar: Analisis faktor-faktor dan solusi yang ditawarkan. *Jurnal Basicedu*, 7(5), 3081–3090. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i5.6022>
- Maimunah, S., et al. (2024). Aksesibilitas inklusif: Implementasi infrastruktur publik ramah disabilitas di Indonesia (sebuah literatur review). *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 250–276. <https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.60851>
- Maryam, M., et al. (2025). Manajemen pendidikan inklusif di UPT SPF SD Negeri Kalukuang II Makassar. *EduPrimaria of Journal*, 1(1), 46–53. <https://jurnal.unibos.ac.id/epj/article/view/4339>
- Munawir, M., et al. (2025). Tantangan dan strategi guru profesional dalam menangani keberagaman siswa di pendidikan inklusif. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 6(2), 275–283. <https://doi.org/10.54371/ainj.v6i2.858>
- Nurhasanah, N., et al. (2024). Efektivitas manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Sabilussa'adah. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(4), 1089. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i4.3568>
- Putri, A., & Mus, S. (2021). Implementasi program pendidikan inklusi di SD Negeri Unggulan. *JAK2P (Jurnal Administrasi, Kebijakan, Dan Kepemimpinan Pendidikan)*, 2(2), 191. <https://doi.org/10.26858/jak2p.v2i2.13474>
- Putri, D. P. P., et al. (2025). Manajemen kurikulum pendidikan inklusi pada sekolah dasar di Kota Bandar Lampung. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 12.

<https://doi.org/10.51878/social.v5i1.4589>

Ramayani, W., & Puspita, S. W. (2024). Penerapan kebijakan pendidikan inklusi. *Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 26–34. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/jshe/article/view/1785>

Ranakusuma, O. I., et al. (2021). Kolaborasi penanganan masalah siswa melalui kemitraan antara Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Universitas YARSI dan guru bimbingan konseling di Jakarta Pusat. *Info Abdi Cendekia*, 4(1), 11–19. <https://doi.org/10.33476/iac.v4i1.57>

Rizqi, S. A. (2025). Identifikasi, hambatan, dan dukungan fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 1413–1420. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.10091>

Sahrudin, M., et al. (2023). Pengelolaan pendidikan inklusif. *Jambura Journal of Educational Management*, 4(1), 162–179. <https://doi.org/10.37411/jjem.v4i1.17822>

Saskia, Y., et al. (2024). Peran Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam pendidikan inklusi di Sekolah Dasar. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(4), 2203–2209. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i4.337>

Sholeh, M. I. (2023). Strategi efektif dalam manajemen pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. *Tarbawi Ngabar: Journal of Education*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.55380/tarbawi.v4i2.462>

Suryani, A. I., & Bagdawansyah, A. (2024). Pengembangan pendidikan inklusif dengan pendekatan berdiferensiasi melalui metode peer teaching dalam kerangka Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar*, 9. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/jipd/article/view/1841>

Susanti, T., & Herawati, N. I. (2024). Implementasi pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 2(1), 64–74. <https://doi.org/10.38048/jpicb.v2i1.3096>

Syarif, N. Q., & Jannah, M. (2024). Persepsi guru terhadap penerapan pendidikan inklusif di SLB Negeri 1 Makassar: Tantangan dan peluang. *JUARA SD: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 3(3), 370–374. <https://doi.org/10.4081/juarasd.v3i3.155>

Tamela, B., et al. (2020). Penyelenggaraan pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus (Studi multi situs di SDN-4 Palangka dan SDN-3 Langkai Kota Palangka Raya). *Journal of Environment and Management*, 1(2), 134–142. <https://doi.org/10.37304/jem.v1i2.1706>

Wijaya, S., et al. (2023). Implementasi program pendidikan inklusi pada Sekolah Dasar di Kota Serang. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(1), 347–357. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i1.4592>

Wulandari, A., et al. (2024). Pentingnya guru dalam pendidikan. *Jurnal Ilmiah Bina Edukasi*, 17(1), 39–55. <https://doi.org/10.33557/jedukasi.v17i1.2652>